PERATURAN BUPATI ASMAT

NOMOR 23 TAHUN 2023



TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AGATS

-ASLI-

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AGATS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Agats.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Undang-Undang ...../3

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6803);

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 329);

22. Peraturan ...../4

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AGATS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Asmat.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Distrik yang dahulu disebut Kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat kerja kabupaten/kota.
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

9. Forum ...../5

9. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.

26. Pusat Lingkungan ...../6

26. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kecamatan/Distrik.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa/Kampung.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteritik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Zona Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
33. *Holding Zone* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana detail tata ruang kabupaten.
34. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
36. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

37. Sub-Zona ...../7

37. Sub-Zona Taman Kota adalah terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
38. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
39. Sub-Zona Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
40. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
41. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
42. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
43. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dlengkapi dengan fasilitasnya.
44. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas taman dan lapangan olahraga.
47. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.
48. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
50. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

52. Sub-Zona ...../8

52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
55. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
56. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
57. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
59. Zona Peruntukan Lainnya adalah zona untuk peruntukan tertentu yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
60. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
61. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
62. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

65. Koefisien ...../9

65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
68. Ketinggian bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
69. Jarak bebas samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
70. Jarak bebas belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Agats ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 1.253,15 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma satu lima) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
(2) Batas-batas delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mbait;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bis Agats dan Kampung Kaye;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kaye dan Kampung Suwru; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Asuwetsy.

(3) Delineasi ...../10

(3) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebagian Kampung Mbait;
b. sebagian Kampung Bis Agats;
c. sebagian Kampung Suwru;
d. sebagian Kampung Kaye; dan
e. Kampung Asuwetsy.

(4) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. SWP I.A, mencakup sebagian Kampung Mbait dan sebagian Kampung Bis Agats hektare, terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B, mencakup sebagian Kampung Bis Agats, sebagian Kampung Asuwetsy, dan Sebagian Kampung Kaye terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
c. SWP I.C, mencakup sebagian Kampung Asuwetsy, sebagian Kampung Suwru dan sebagian Kampung Kaye terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(5) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 4

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. PPK;
b. SPPK; dan
c. PPL.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.4.

(4) PPL sebagaimana ...../11

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   (1) PL kecamatan; dan
   (2) PL kelurahan/desa.
(5) PL kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7.
(6) PL kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 5

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. jembatan;
   d. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
   e. lintas penyeberangan;
   f. pelabuhan penyeberangan;
   g. pelabuhan pengumpul; dan
   h. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalan lokal primer;
   b. jalan lokal sekunder;
   c. jalan lingkungan primer; dan
   d. jalan lingkungan sekunder.
(2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Pasal 7

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Pasal 8 ...../12

Pasal 8

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(1). Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
(2). Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan review.
(3). Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. alur-pelayaran kelas I berupa alur pelayaran Agats – Merauke dan Agats – Pomako; dan
b. alur-pelayaran kelas III berupa alur pelayaran Distrik Sawa Erma – Distrik Agats – Distrik Akat - Distrik Atsj.

Pasal 10

Lintas penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi berupa lintas penyeberangan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke; dan
b. lintas penyeberangan dalam kabupaten berupa lintas penyeberangan Distrik Sawa Erma – Distrik Agats – Distrik Akat - Distrik Atsj – Distrik Pantai Kasuari.

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berupa pelabuhan penyeberangan kelas I terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Pasal 12

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa Pelabuhan Agats yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Pasal 13

Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. rencana jaringan energi;

b. rencana ...../13

b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan air minum;
d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
e. rencana jaringan persampahan;
f. rencana jaringan drainase; dan
g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. gardu hubung yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
b. gardu distribusi terdiri atas:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berupa jaringan bergerak seluler.
(2) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.5.
(3) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 ...../14

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. unit distribusi; dan
b. unit pelayanan.
(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. hidran umum; dan
b. hidran kebakaran.
(5) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.3.
(6) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sumur pompa; dan
b. bak penampungan air hujan.
(8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.3.
(9) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
(10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. sub-sistem pelayanan berupa pipa tinja yang terdapat di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
b. sub-sistem pengolahan terpusat berupa IPAL kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(3) Rencana ...../15

(3) Rencana jaringan sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
b. tempat penampungan sementara (TPS).
(2) tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8.
(3) tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; ...../16

c. jalur sepeda;
d. jaringan pejalan kaki; dan
e. tanggul penahan longsor.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.7;
b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.A SWP I.B, dan SWP I.C.

(8) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa tanggul tepi Sungai Asuwetsy terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 ...../17

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 24

(1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 788,34 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma tiga empat) hektare terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(2) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat *holding zone* dengan luas 757,13 (tujuh ratus lima puluh tujuh koma satu tiga) hektare yang peruntukannya sebagai berikut:
a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode HL/PS dengan luas 50,68 (lima puluh koma enam delapan) hektare, terdiri atas:
1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7;
2) SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
3) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
b. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode HL/RTH-1 dengan luas 277,31 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tiga satu) hektare, terdiri atas:
1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
2) SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
3) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
c. Sub-Zona Taman Kota dengan kode HL/RTH-2 dengan luas 30,14 (tiga puluh koma satu empat) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode HL/PTL dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HL/R-4 dengan luas 105,78 (seratus lima koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:
1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
2) SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
3) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.6.
f. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode HL/SPU-1 dengan luas 9,46 (sembilan koma empat enam) hektare, terdiri atas:
1) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; dan
2) SWP I.C pada Blok I.C.4.
g. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode HL/SPU-2 dengan luas 6,12 (enam koma satu dua) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode HL/K-2 dengan luas 44,35 (empat puluh empat koma tiga lima) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
i. Zona Perkantoran dengan kode HL/KT seluas 228,46 (dua ratus dua puluh delapan koma empat enam) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
j. Zona Transportasi dengan kode HL/TR seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektare, terdiri atas:
1) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
2) SWP I.B pada Blok I.B.3.

k. Sub-Zona ...../18

k. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode HL/PL-3 dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
l. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode HL/PL-4 dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
m. Sub-Zona Pergudangan dengan kode HL/PL-6 dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(3) Rencana pemanfaatan ruang Zona Hutan Lindung dengan kode HL, berlaku setelah pelepasan hutan disetujui oleh Menteri yang membidangi kehutanan.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 61,18 (enam puluh satu koma satu delapan) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.7;
b. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 15,31 (lima belas koma tiga satu) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.5.

(4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 4,00 (empat) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Ketiga ...../19

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
b. Zona Pariwisata dengan kode W;
c. Zona Perumahan dengan kode R;
d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
e. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
h. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
i. Zona Transportasi dengan kode TR;
j. Zona Pertahanan dan Keamananan dengan kode HK; dan
k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 28

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan luas 1,51 (satu koma lima satu) hektare, yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 2
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan luas 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 30

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas 250,03 (dua ratus lima puluh koma nol tiga) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
   b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 165,26 (seratus enam puluh lima koma dua enam) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(3) Sub-Zona ...../20

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 84,77 (delapan puluh empat koma tujuh tujuh) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan luas 32,29 (tiga puluh dua koma dua sembilan) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 14,59 (empat belas koma lima sembilan) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.7;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
(3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 16,87 (enam belas koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
(4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan luas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare, yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan luas 48,41 (empat puluh delapan koma empat satu) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona ...../21

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare, yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 26,01 (dua puluh enam koma nol satu) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan luas 17,49 (tujuh belas koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.

Paragraf 8
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare, yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, dengan luas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare, terdiri atas:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2;

b. SWP I.B ...../22

b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, dengan luas 12,37 (dua belas koma tiga tujuh) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
   b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2,70 (dua koma tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
(3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Agats.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
   b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

(1) Ketentuan pelaksanaan KKPR Kawasan Perkotaan Agats sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagai dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program ...../23

(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Agats.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
   d. sumber pembiayaan lainnya yang sah.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah provinsi;
   c. Pemerintah Daerah kabupaten;
   d. swasta; dan/atau
   e. Masyarakat.
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program Pemanfaatan Ruang prioritas pada WP Kawasan Perkotaan Agats, meliputi:
   a. tahapan pertama pada periode tahun 2023-2024;
   b. tahapan kedua pada periode tahun 2025-2029;
   c. tahapan ketiga pada periode tahun 2030-2034;
   d. tahapan keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
   e. tahapan kelima pada periode tahun 2040-2043.
(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai berikut:
   a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   b. acuan dalam pemberian KKPR, terutama di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
(2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
   a. aturan dasar; dan
   b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua ...../24

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 43

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. aturan dasar Zona Lindung; dan
   b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan;
   b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
   c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
   d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan terbatas dalam arti kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah, jam operasi, luas lantai bangunan dan luasan kaveling. Kegiatan dengan klasifikasi T ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:
   a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   b. T2 untuk pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun TB, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
   c. T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
   d. T4 untuk pembatasan luasan kaveling suatu kegiatan di dalam zona.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus, yang terdiri dari:
   a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar;

b. B2 ...../25

b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. B3 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah.

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, meliputi:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimal; dan
d. luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang, tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub-zona meliputi:
a. TB maksimum;
b. GSB minimum;
c. Jarak bebas antar bangunan minimal;
d. JBB minimal; dan
e. JBS minimal.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jalur pejalan kaki;
b. jaringan jalan;
c. ruang terbuka hijau;
d. ruang terbuka non hijau;
e. utilitas perkotaan;
f. prasarana lingkungan; dan
g. ketentuan lainnya yang diperlukan.

(2) Ketentuan ...../26

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 48

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. aturan dasar Zona Perlindungan setempat dengan kode PS; dan
c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

Pasal 49

Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   a. KDB maksimal 0 (nol) persen;
   b. KLB maksimal 0 (nol); dan
   c. KDH minimal 100 (seratus) persen.
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal disesuaikan dengan upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

Pasal 50

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
   b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
   c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   a. TB maksimum 4 (empat) meter;
   b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
   c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
   d. JBS untuk minimum 3 (tiga) meter.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 51

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
a. aturan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
b. aturan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

c. aturan Sub-Zona ...../27

c. aturan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
d. aturan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Pasal 52

Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
    b. KLB maksimal 0,1 (nol koma dua); dan
    c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 4 (empat) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
    d. JBS untuk minimum 3 (tiga) meter.
    e. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan dan sesuai/mencirikan kearifan lokal Asmat.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa *bin plastic* atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan
    b. faslitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.

Pasal 53

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
    b. KLB maksimal 0,1 (nol koma dua); dan
    c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 4 (empat) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBB minimum 3 (tiga) meter;
    d. JBS untuk minimum 3 (tiga) meter; dan
    e. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan dan sesuai/mencirikan kearifan lokal Asmat.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
    b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan

c. jaringan ...../28

c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 54

Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
    b. KLB maksimal 0,1 (nol koma dua); dan
    c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 4 (empat) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
    d. JBS untuk minimum 3 (tiga) meter.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
    b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan
    c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 55

Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
    b. KLB maksimal 0,1 (nol koma dua); dan
    c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 4 (empat) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan dan sesuai/mencirikan kearifan lokal Asmat.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. fasilitas lampu jalan;
    b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan

c. jaringan ...../29

c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 56

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
b. Zona Pariwisata dengan kode W;
c. Zona Perumahan dengan kode R;
d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
e. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
f. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
h. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
i. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
j. Zona Pertahanan dan Keamananan dengan kode HK; dan
k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 57

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
    c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBS minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;
    d. JBB minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; dan
    e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
    b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

Pasal 58

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
    c. KDH minimal 50 (lima puluh) persen.

(3) Ketentuan ...../30

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
   b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
   c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
      1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
      2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
   d. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;
   e. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter; dan
   f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
   b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman lingkungan;
   c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
   d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
   e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
   g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 59

Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

Pasal 60

Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
   c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
   d. luas kaveling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
   b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;

c. jarak bebas ...../31

c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
   1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
   2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d. JBB untuk rumah tunggal, kopel dan deret minimum 1,5 (satu koma lima) meter untuk kaveling kecil dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk kaveling sedang dari batas kaveling;
e. JBS untuk minimum 1,5 (satu koma lima) meter untuk kaveling kecil dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk kaveling sedang dari batas kaveling, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
c. RTH berupa taman kota/lingkungan/kampung;
d. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter;
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan
g. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.

Pasal 61

Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
d. luas kaveling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
   1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
   2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d. JBB untuk rumah tunggal, kopel dan deret minimum 1,5 (satu koma lima) meter untuk kaveling kecil dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk kaveling sedang dari batas kaveling;

e. JBS ...../32

e. JBS untuk minimum 1,5 (satu koma lima) meter untuk kaveling kecil dan 2,5 (dua koma lima) meter untuk kaveling sedang dari batas kaveling, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan

f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;

b. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

c. RTH berupa taman kota/lingkungan/kampung;

d. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter atau yang sesuai dengan kondisi Perkotaan Agats;

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;

f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan

g. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.

Pasal 62

Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:

a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;

b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

Pasal 63

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

a. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;

b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;

c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:

1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan

2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.

d. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;

e. JBB ...../33

e. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik;
c. bangunan harus menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 64

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;
e. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman taman lingkungan/kampung;
c. bangunan menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;

d. setiap ...../34

d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 65

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
   b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
   c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
   b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
   c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
      1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
      2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
   d. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;
   e. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter; dan
   f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
   b. RTH berupa taman taman lingkungan/kampung;
   c. bangunan menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
   d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
   e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
   g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
   h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
   i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 66 ...../35

Pasal 66

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas kaveling;
    b. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh); dan
    c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 4 (empat) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
        1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
        2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
    d. JBS minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;
    e. JBB minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; dan
    f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
    b. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
    c. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    d. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan; dan
    e. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 67

Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, meliputi:

a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

Pasal 68

Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
    c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBS minimum 3 (tiga) meter;

d. JBB minimum ...../36

d. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung;
c. bangunan harus memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan
g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 69

Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d. JBS minimum 2 (dua) meter;
e. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung;
c. bangunan harus memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan lahan parkir minimum 15 (lima belas) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan
g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 70 ...../37

Pasal 70

Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
    b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
    c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
        1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
        2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
    d. JBS untuk minimum 2 (dua) meter;
    e. JBB belakang minimum 2 (dua) meter; dan
    f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
    b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung;
    c. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
    d. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. penyediaan lahan parkir minimum 15 (lima belas) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan
    f. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 71

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
    c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
        1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan
        2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.

d. JBS ...../38

d. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kaveling;
e. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kaveling; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kawasan;
c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 72

Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
b. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh); dan
c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. JBS minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;
d. JBB minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; dan
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan.

Pasal 73

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

b. KLB ...../39

b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;
d. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter; dan
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
d. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
e. setiap bangunan harus menyediakan penampungan untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
h. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 74

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j, meliputi:

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat); dan
c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
c. JBS untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter;
d. JBB untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter; dan
e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
b. RTH berupa taman;
c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;

e. tersedia ...../40

e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan
g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 75

Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k, meliputi:
a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
b. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 76

Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
    c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. JBS minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;
    d. JBB minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; dan
    e. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
    b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

Pasal 77

Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
    b. KLB maksimum 0,8 (nol koma enam); dan
    c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    a. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
    b. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
    c. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
        1. kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antar satu dengan lainnya; dan

2. kaveling ...../41

2. kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.

d. JBS minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling;
e. JBB minimal 5 (lima) meter dari batas kaveling; dan
f. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 78

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan dengan fungsi Zona/Sub-Zona lainnya, meliputi:
a. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
b. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 79

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:
a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
b. menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
c. tempat evakuasi sementara tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi; dan/atau
d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
b. menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
c. tempat evakuasi akhir tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi dan tidak berdekatan dengan potensi bencana lainnya; dan/atau
d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai; dan
b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.

(2) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
   3. KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
b. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
   2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter; dan
   3. konstruksi bangunan tahan gempa dan banjir mengikuti SNI yang berlaku atau sesuai karakteristik fisik WP.
c. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
   2. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
   3. RTH berupa taman kota/lingkungan/kampung;
   4. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter;
   5. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
   6. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan
   7. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.

(3) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
   3. KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
b. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
   2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter; dan
   3. konstruksi bangunan tahan gempa dan banjir mengikuti SNI yang berlaku atau sesuai karakteristik fisik WP.
c. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
   2. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
   3. RTH berupa taman kota/lingkungan/kampung;

4. Menyediakan ...../43

4. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter;
5. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
6. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan
7. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 81

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Pasal 82

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
   a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan tujuan penataan WP;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana detail tata ruang;
   c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
   d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. fasilitasi KKPR;
   b. keringanan pajak;
   c. pemberian kompensasi;
   d. subsidi;
   e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   f. penghargaan.

(5) Disinsentif ...../44

(5) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, terdiri atas:
a. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan
b. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak tanah dan atau/surat keterangan lurah, dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh yang berbatasan langsung dengan warga.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 84

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Agats adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Agats dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan ...../45

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Asmat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Agats dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Asmat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Agats dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan Ruang di RDTR Kawasan Perkotaan Agats yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

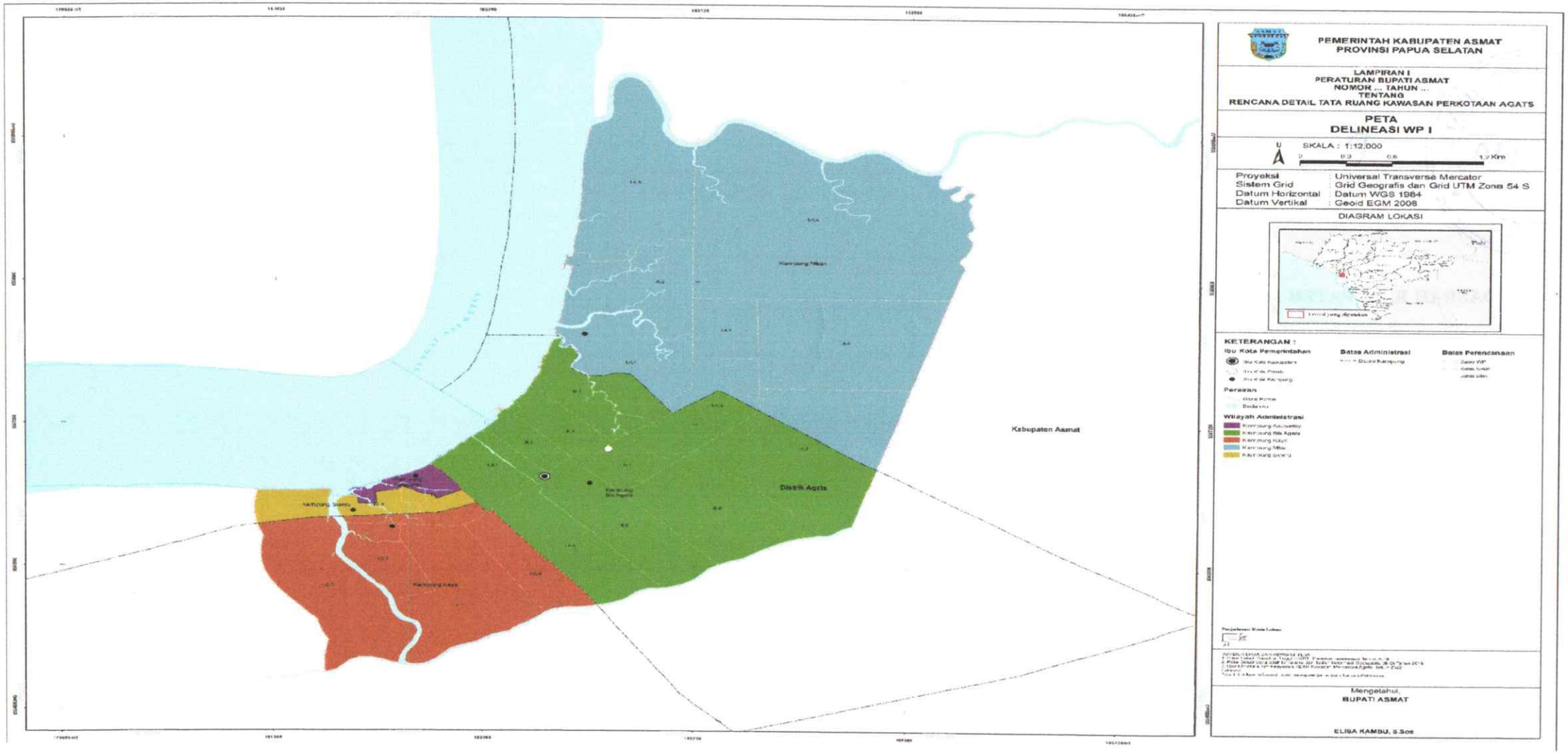
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

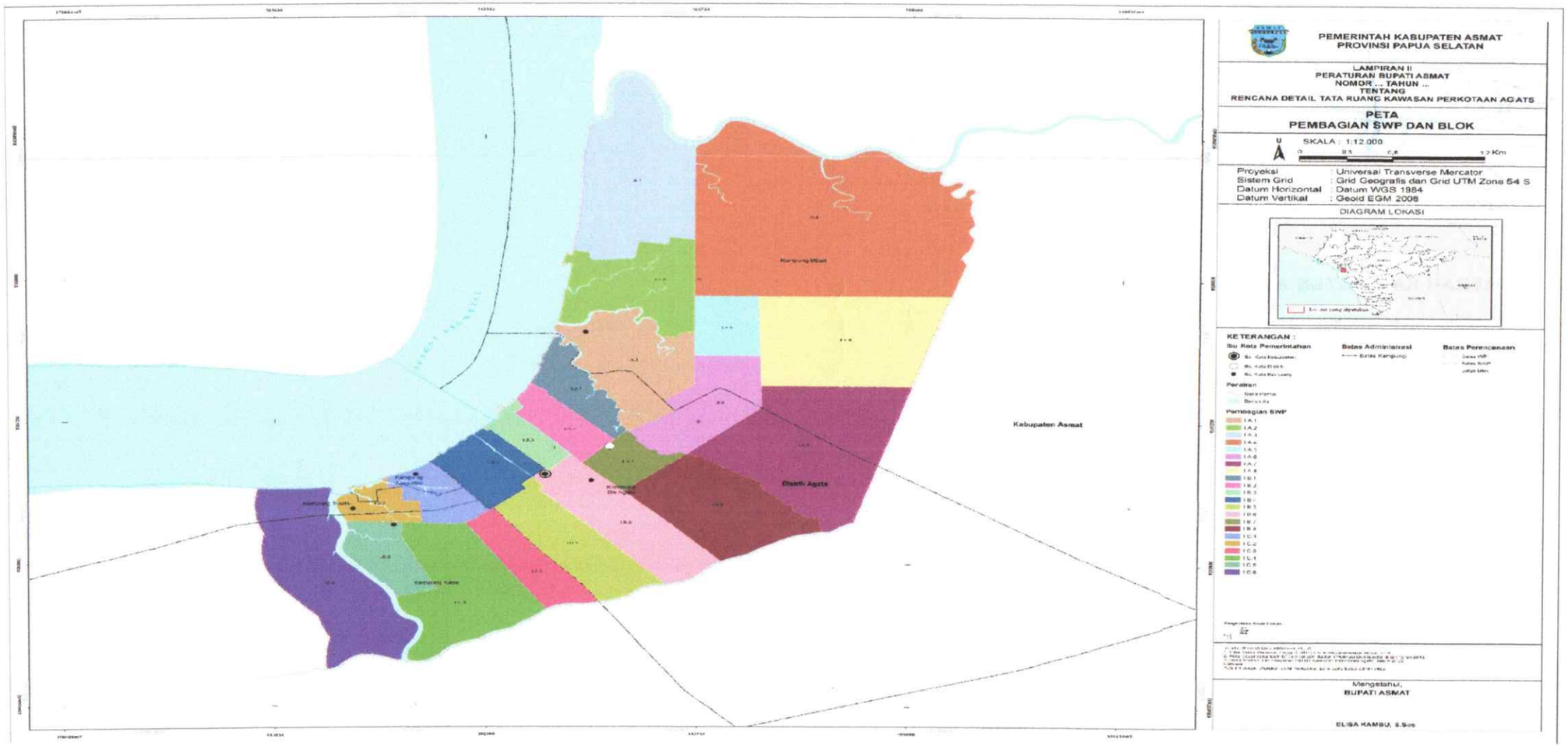
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN II : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

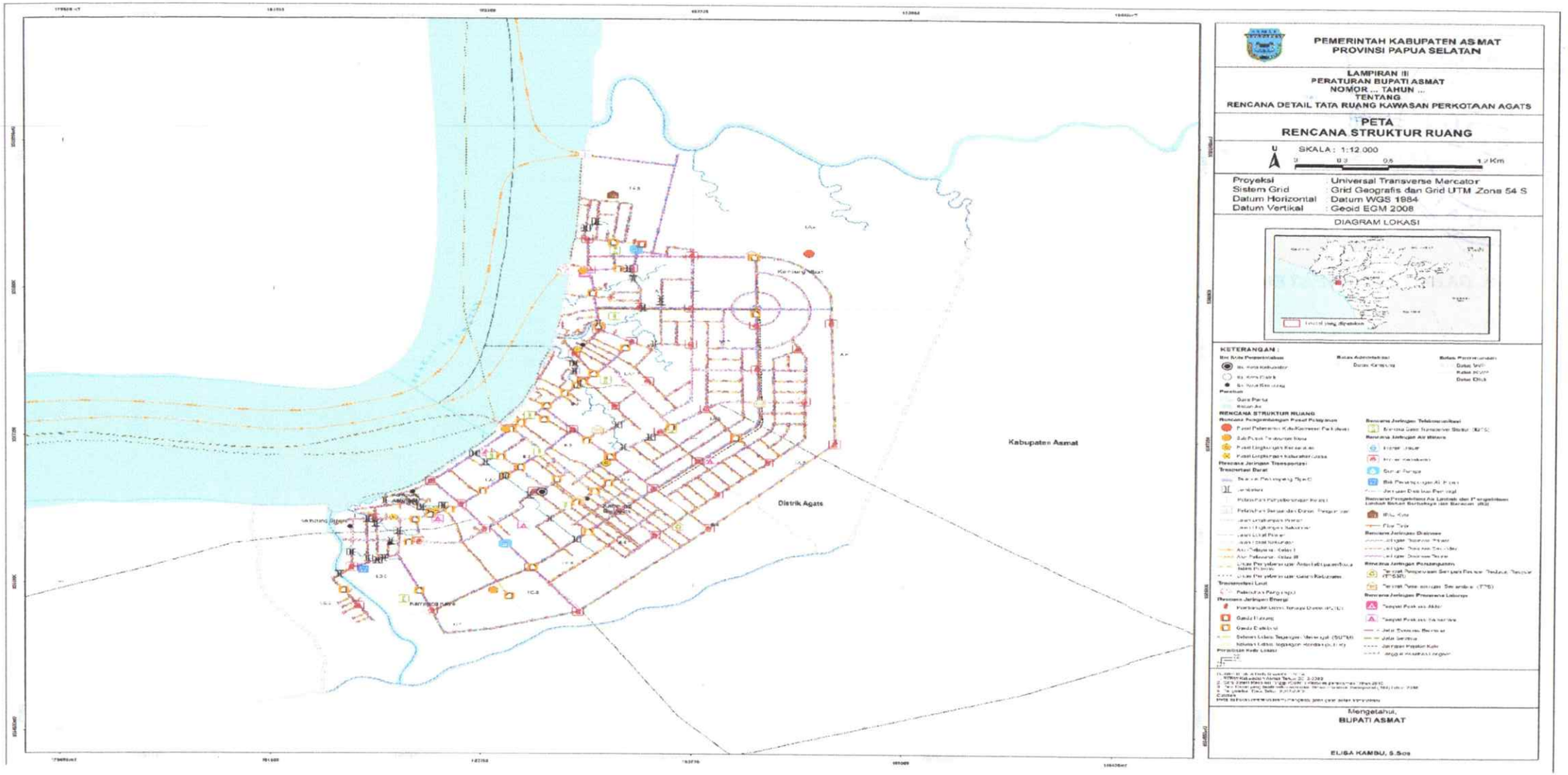
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

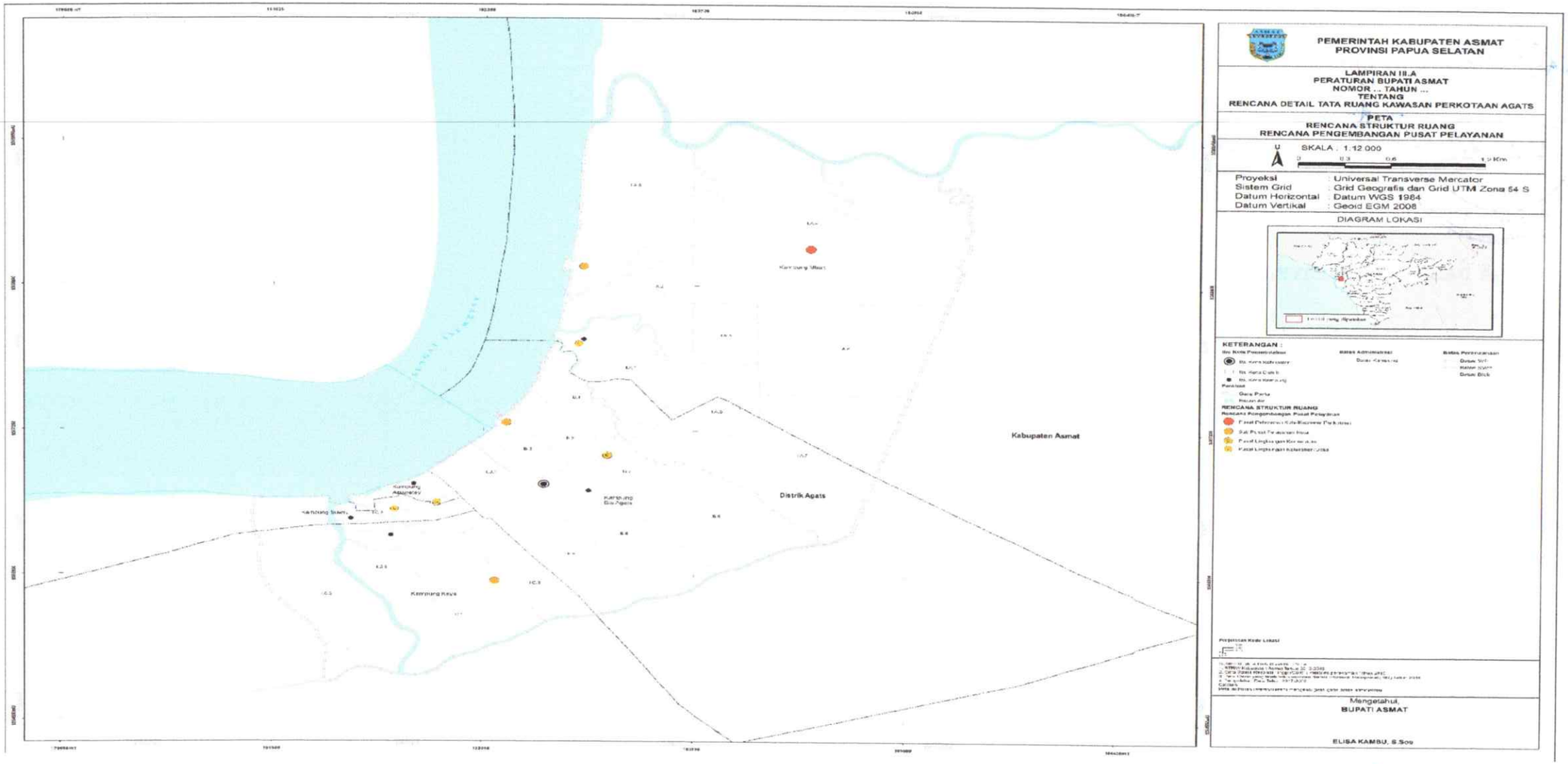
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.A : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

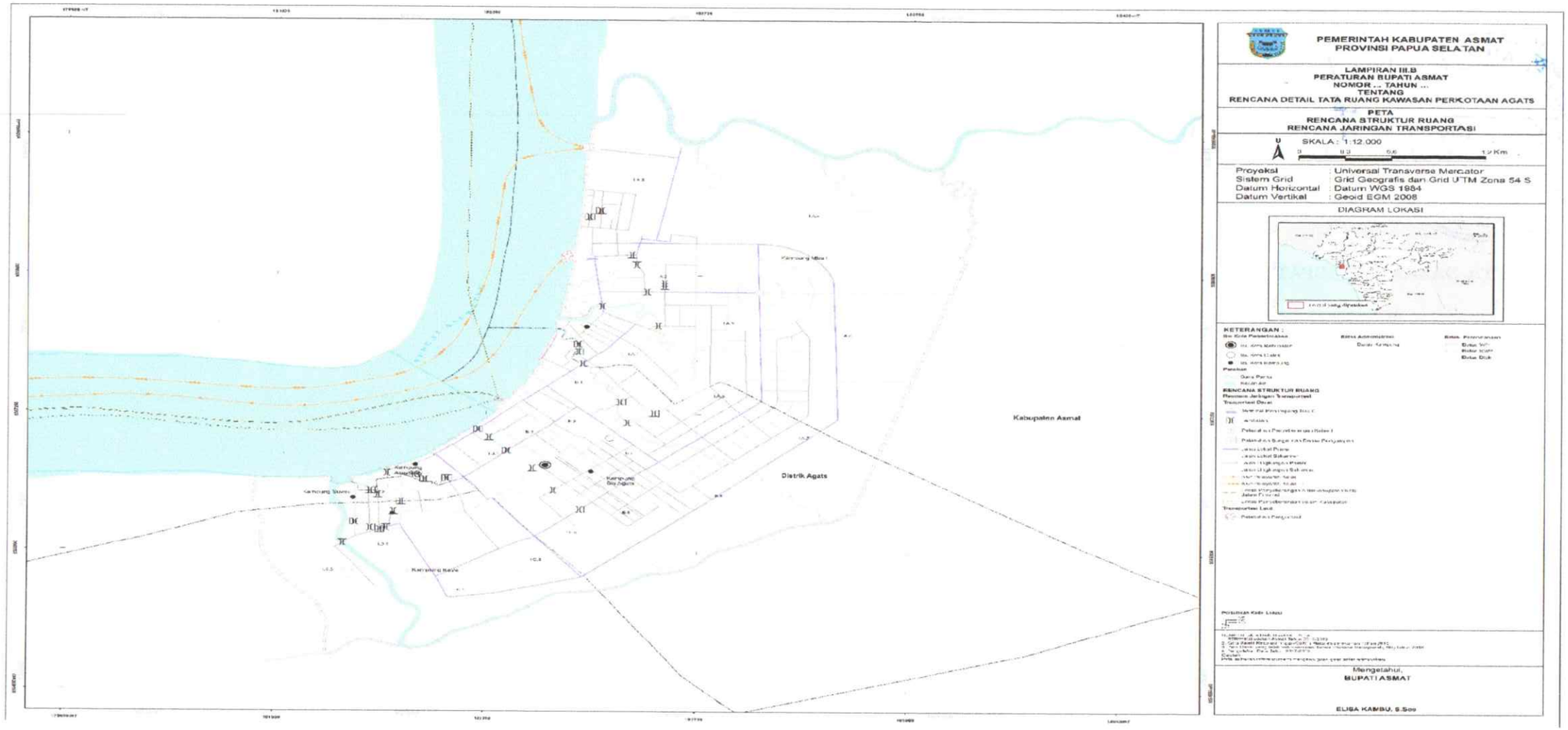
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.B : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 2023

BUPATI ASMAT,

ELIGA KAMBU

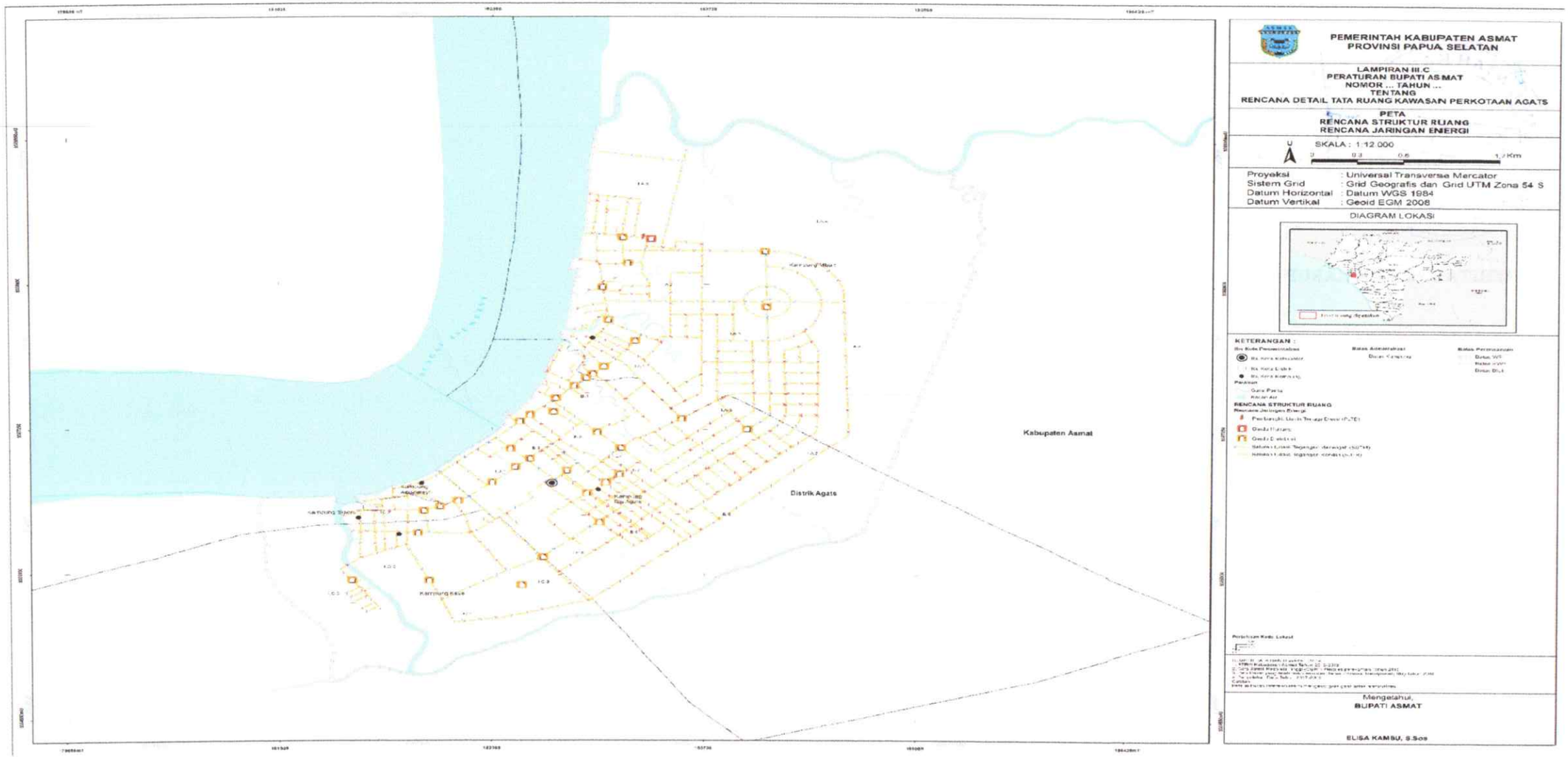
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.C : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

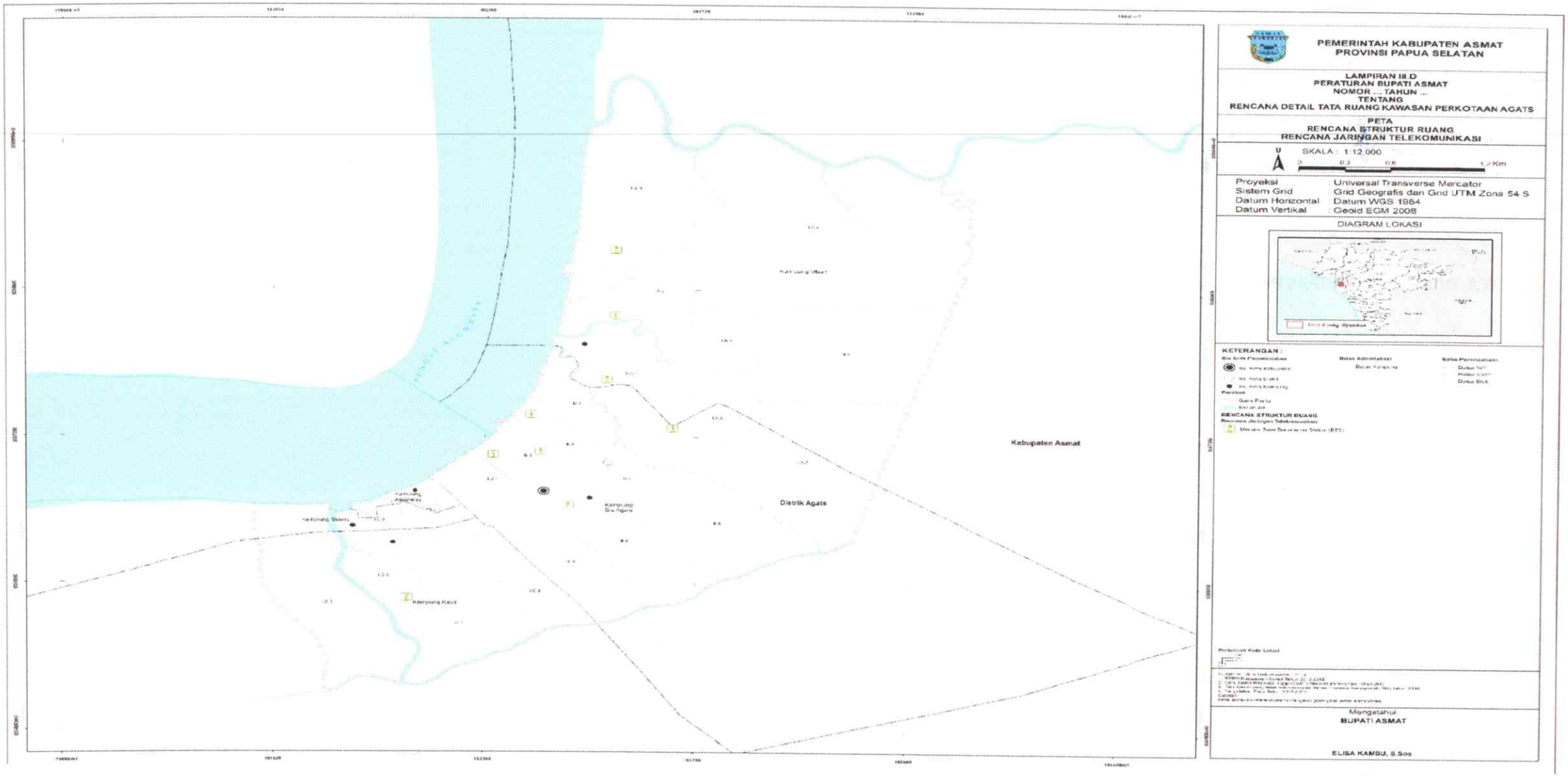
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.D : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

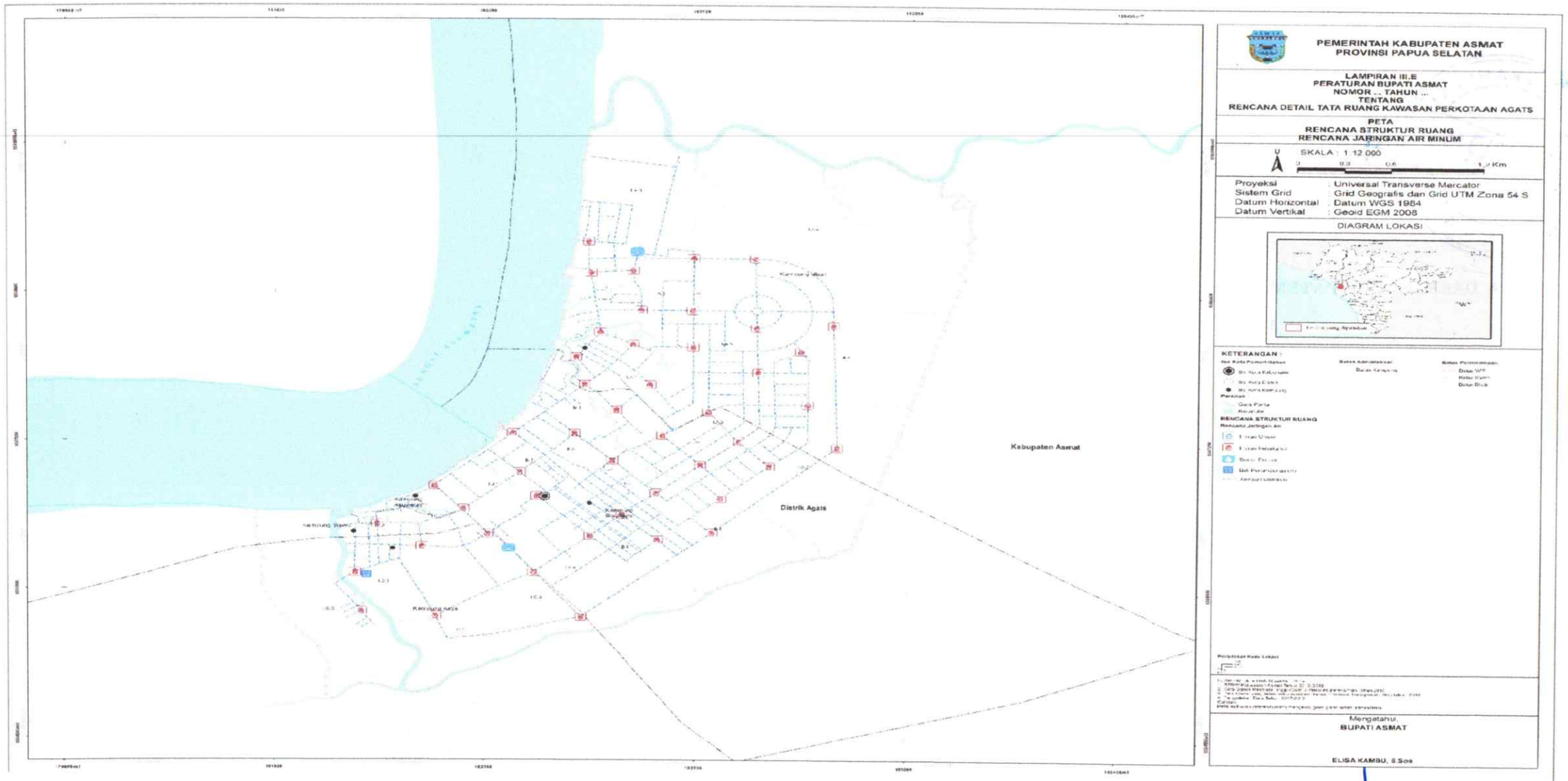
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.E : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

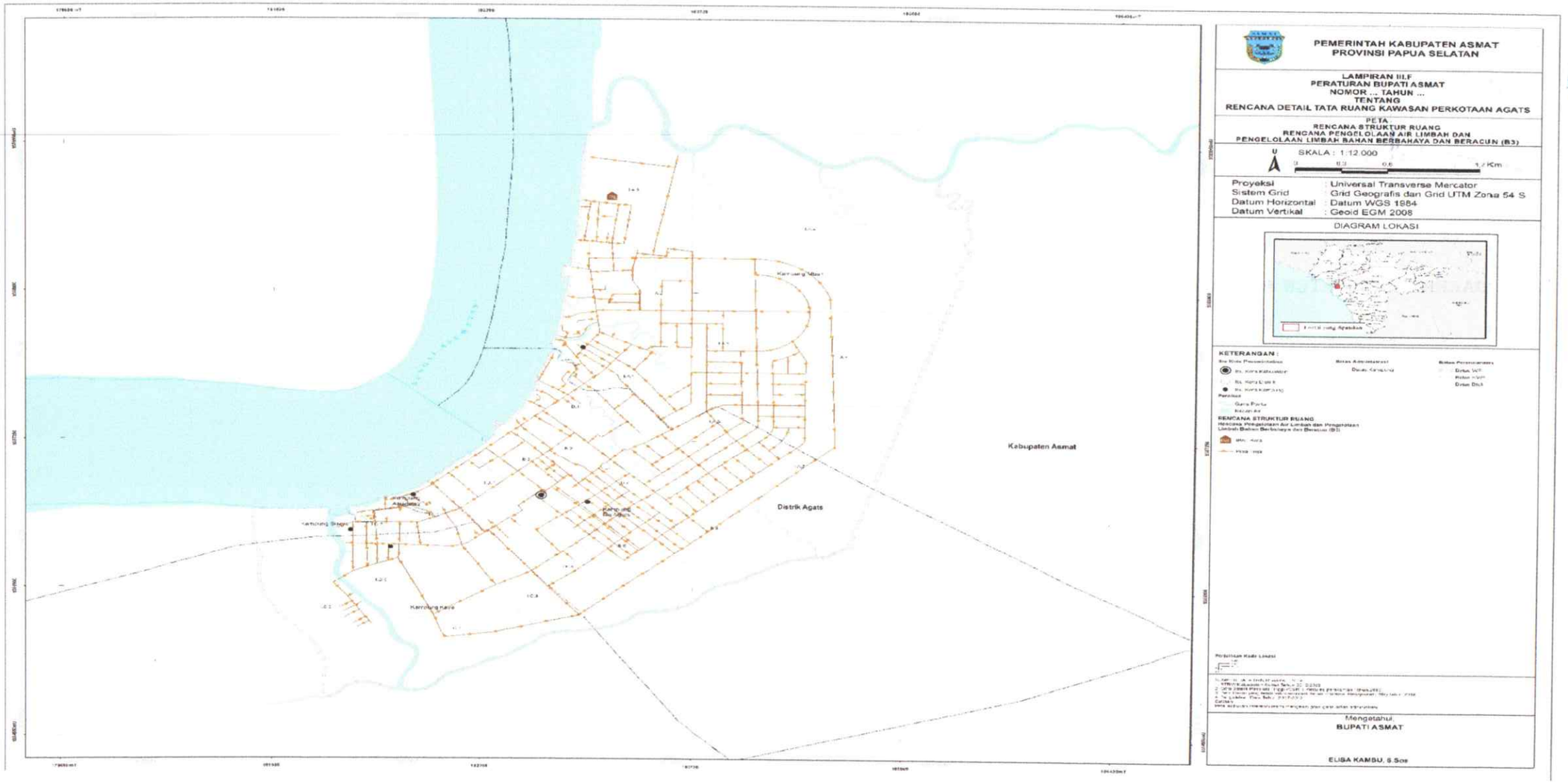
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.F : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

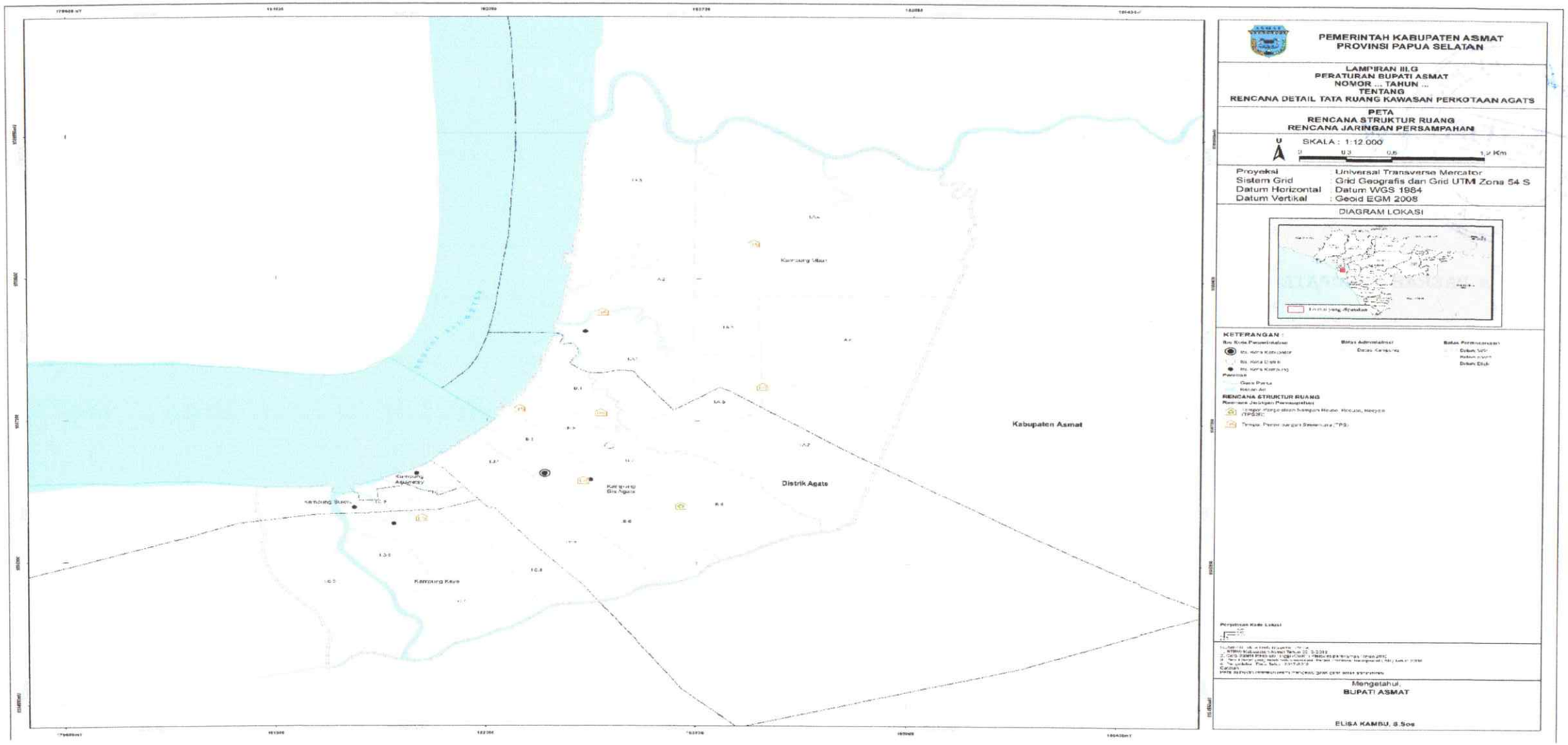
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.G : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

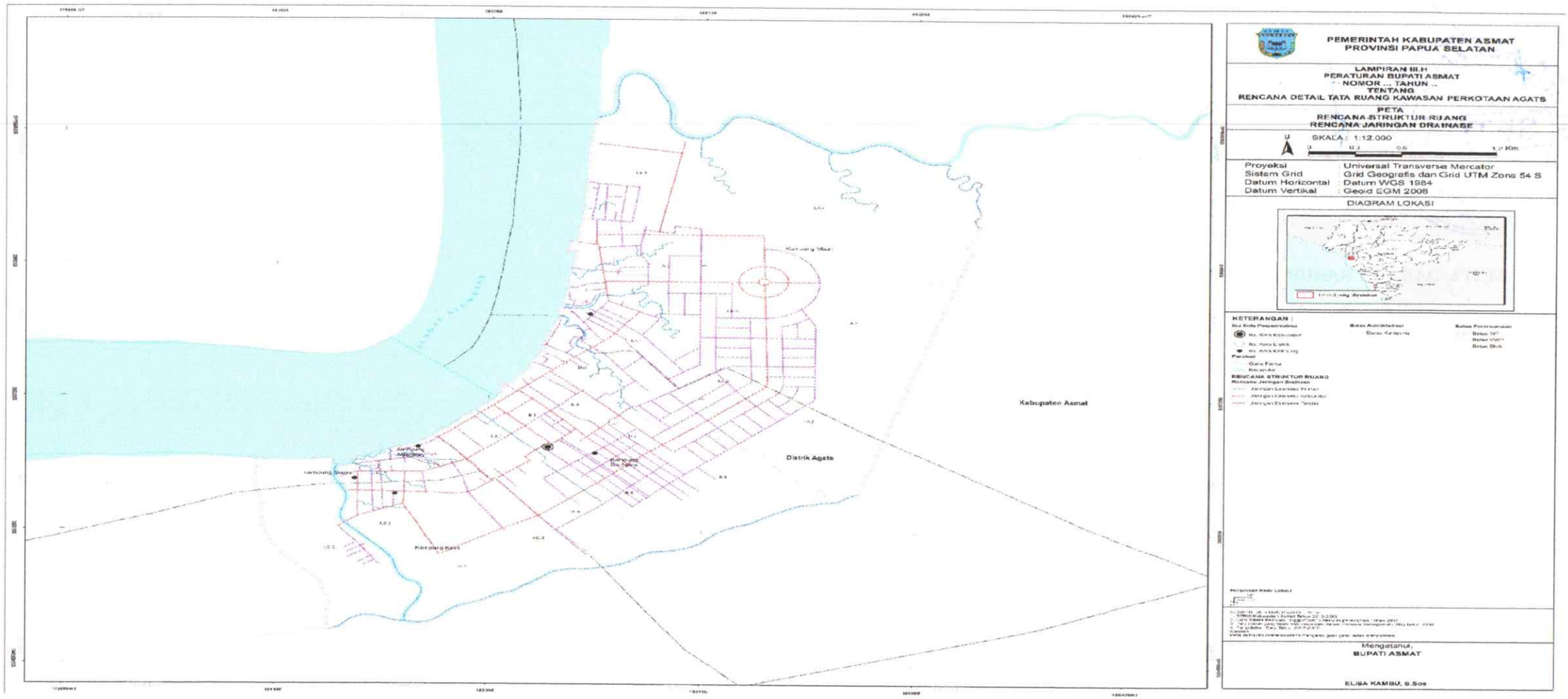
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.H : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

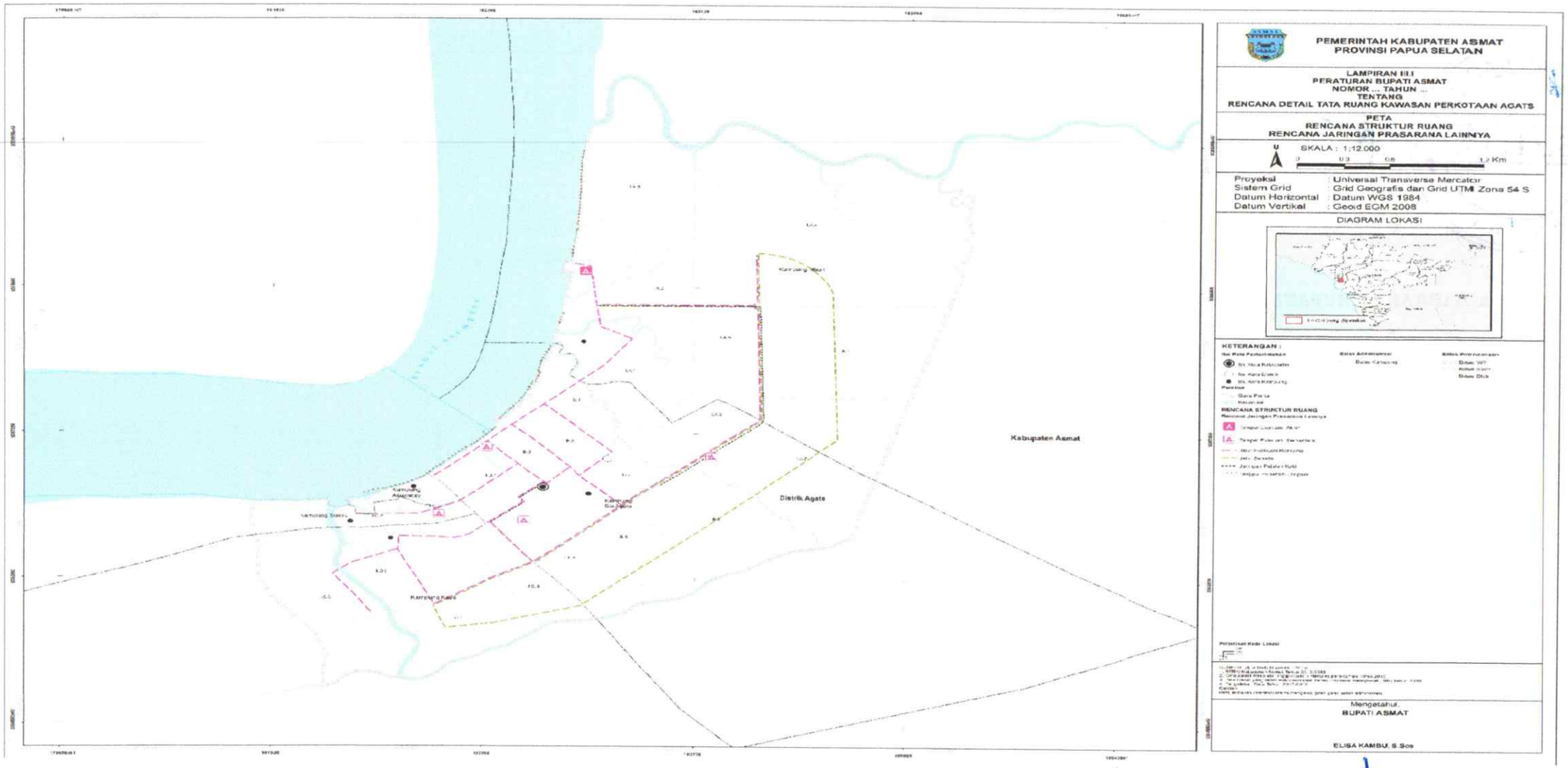
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN III.I : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

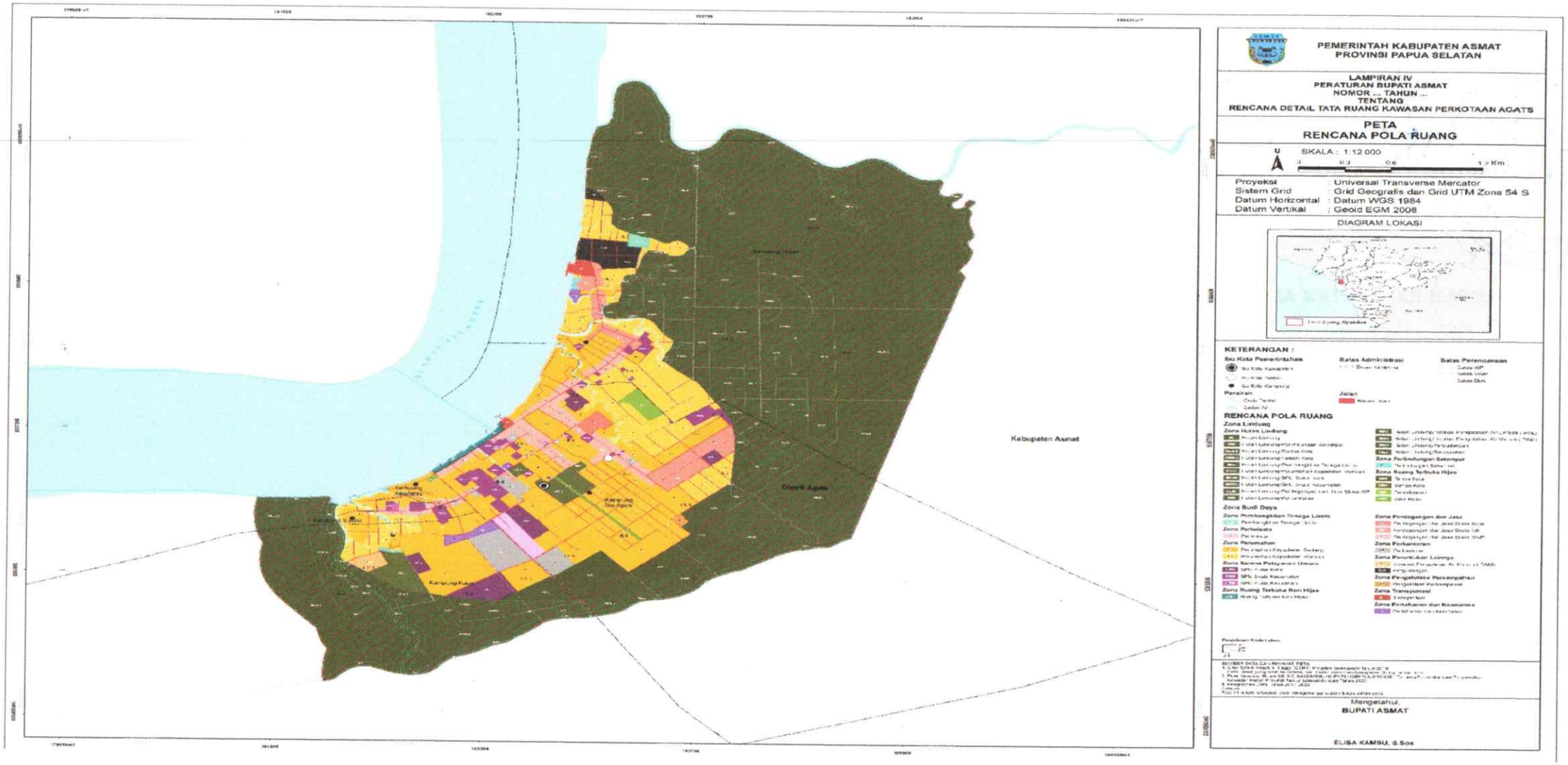


Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

LAMPIRAN IV : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN V : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.	**PERWUJUDAN RENCANA SRUKTUR RUANG**													
I.1	**RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**													
I.1.A	**PUSAT PELAYANAN KOTA**													
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	SWP I.A pada Blok I.A.4											APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PU Kabupaten
2	Pembuatan RTBL PPK												APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten BP4D Kabupaten
I.1.B	**SUB PUSAT PELAYANAN KOTA**													
1	Pengembangan sub pusat pelayanan kota (SPPK)	SWP I.A pada Blok I.A.2 SWP I.B pada Blok I.B.3 SWP I.C pada Blok I.C.4											APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten
2	Pembuatan RTBL SPPK												APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten BP4D Kab. Asmat
I.1.C	**PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN**													
1	Pengembangan PL kecamatan	SWP I.B pada Blok I.B.7											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.

2 Pengembangan PL kelurahan ...../2

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pengembangan PL kelurahan	**SWP I.A** pada Blok I.A.1 **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.2											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.
I.2	**RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**													
I.2.A	**JALAN UMUM**													
I.2.A.1	**JALAN LOKAL PRIMER**													
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.2	**JALAN LOKAL SEKUNDER**													

1 Pembangunan jaringan jalan baru ...../3

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.3	**JALAN LINGKUNGAN PRIMER**													
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.4	**JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER**													

1 Pembanguran jaringan jalan baru ...../4

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.B	**TERMINAL PENUMPANG**													
1	Pembangunan terminal type C	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
I.2.C	**JEMBATAN**													
1	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6. **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7. **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Dinas PU Kab. Asmat dan/atau Swasta.

1.2.D ALUR-PELAYARAN SUNGAI DAN ALUR-PELAYARAN DANAU ...../5

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.2.D	**ALUR-PELAYARAN SUNGAI DAN ALUR-PELAYARAN DANAU**													
1	Pengembangan dan Pemeliharaan alur-pelayaran kelas I	Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau kelas I											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
2	Pengembangan dan Pemeliharaan alur-pelayaran kelas III	Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau kelas III											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
I.2.E	**LINTAS PENYEBERANGAN**													
1	Pemeliharaan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi	Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
1	Pemeliharaan lintas penyeberangan dalam kabupaten	Lintas penyeberangan dalam kabupaten											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
I.2.F	**PELABUHAN PENYEBERANGAN**													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I	SWP I.B pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.2.G	**PELABUHAN PENGUMPUL**													
1	Pengembangan/Pemeliharaan pelabuhan pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.2.H	**PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU PENGUMPAN**													
1	Pembangunan/Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.3	**RENCANA JARINGAN PRASARANA**													
I.3.A	**RENCANA JARINGAN ENERGI**													

I.3.4.1 INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG ...../7

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.3.A.1	**INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG**													
1	Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.A.2	**JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**													
1	Pemeliharaan dan pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
2	Pemeliharaan dan pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.A.3	**JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**													
1	Pemeliharaan gardu hubung	**SWP I.A** pada Blok I.A.3											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta

2 Pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi ...../8

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6 **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7 **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.B	**RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**													
I.3.B.1	**JARINGAN BERGERAK SELULER**													
1	Pemeliharaan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS)	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6 **SWP I.B** pada Blok I.B.2 Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 **SWP I.C** pada Blok I.C.5											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom Indonesia, Pemda dan/atau Swasta

I.3.C RENCANA JARINGAN AIR MINUM ...../9

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.3.C	**RENCANA JARINGAN AIR MINUM**													
I.3.C.1	**JARINGAN PERPIPAAN**													
I.3.C.1.a	**Unit Distribusi**													
1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.C.1.b	**Unit Pelayanan**													
1	Pemeliharaan hidran umum	**SWP I.A** pada Blok I.A.3. **SWP I.C** pada Blok I.C.3.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

Pengembangan hidran kebakaran ...../10

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pengembangan hidran kebakaran	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8 **SWP I.B** pada Blok I.B.2 Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.C.2	**BUKAN JARINGAN PERPIPAAN**													
1	Pemeliharaan sumur pompa	**SWP I.A** pada Blok I.A.3. **SWP I.C** pada Blok I.C.3.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

2 Pemeliharaan bak penampungan air hujan ...../11

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pemeliharaan bak penampungan air hujan	SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.D	**RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**													
1	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa tinja	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa IPAL Kota	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten dan/atau Swasta

I.3.E RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN ...../12

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.3.E	**RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**													
1	Pengembangan kapasitas tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)	SWP I.B pada Blok I.B.8											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
2	Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.7; **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6; dan **SWP I.C** pada Blok I.C.2.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
3	Penambahan alat angkut sampah	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
I.3.F	**RENCANA JARINGAN DRAINASE**													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan jaringan drainase primer	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G	**RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**													
I.3.G.1	**JALUR EVAKUASI BENCANA**													
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.2	**TEMPAT EVAKUASI BENCANA**													

1 Pengembangan tempat evakuasi sementara ...../14

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan tempat evakuasi sementara	**SWP I.A** pada Blok I.A.7 **SWP I.B** pada Blok I.B.4, Blok I.B.5 **SWP I.C** pada Blok I.C.1.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.3	**JALUR SEPEDA**													
1	Pengembangan jalur sepeda	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.4	**JARINGAN PEJALAN KAKI**													
1	Pengembangan jaringan pejalan kaki	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.5	**TANGGUL PENAHAN LONGSOR**													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan/Penambahan tanggul penahan longsor	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
II.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**													
II.1.	**PERWUJUDAN ZONA LINDUNG**													
II.1.A	**ZONA HUTAN LINDUNG (HL)**													
1	Penetapan dan pemeliharaan Hutan Lindung	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8 **SWP I.B** pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta

2 Pelepasan kawasan hulan lindung ...../16

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pelepasan kawasan hulan lindung	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8 **SWP I.B** pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.B	**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**													
1	Pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai dan sempadan pantai	**SWP I.A** pada Blok I.A.2 **SWP I.C** pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.B.1	**PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													

1 Perwujudan Zona Perlindungan Setempat pada perubahan fungsi kawasan hutan ...../17

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat pada perubahan fungsi kawasan hutan	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7 **SWP I.B** pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.C	**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**													
1	Pengembangan RTH Rimba Kota (RTH-1)	**SWP I.A** pada Blok I.A.7 **SWP I.B** pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan RTH Taman Kota (RTH-2)	**SWP I.B** pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6. **SWP I.C** pada Blok I.C.5.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta

3 Pengembangan dan pemeliharaan RTH Pemakaman (RTH-7) ...../18

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
3	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Pemakaman (RTH-7)	**SWP I.A** pada Blok I.A.1. **SWP I.B** pada Blok I.B.1. **SWP I.C** pada Blok I.C.1											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
4	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Jalur Hijau (RTH-8)	**SWP I.B** pada Blok I.B.6. **SWP I.C** pada Blok I.C.2.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.C.1	**PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan RTH Rimba Kota (RTH-1) pada perubahan fungsi kawasan hutan	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8; **SWP I.B** pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan **SWP I.C** pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Perwujudan RTH Taman Kota (RTH-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan													

...../19

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Perwujudan RTH Taman Kota (RTH-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.	**PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA**													
II.2.A	**ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**													
1	Pengembangan zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.A pada Blok I.A.3.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
II.2.A.1	**PERWUJUDAN ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
II.2.B	**ZONA PARIWISATA**													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pengembangan/Pemeliharaan Museum Asmat	**SWP I.B** pada Blok I.B.5 **SWP I.C** pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.C	**ZONA PERUMAHAN**													
II.2.C.1	**SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**													
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Sedang	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.6. **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8. **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan perumahan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta

3 Pengembangan RTH privat ...../21

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengembangan RTH privat	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.C.3	**SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**													
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Rendah	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7 **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.2, Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan perumahan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta

3. Pengembangan RTH privat ...../22

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengembangan RTH privat	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.C.4	**PERWUJUDAN SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) pada perubahan fungsi kawasan hutan	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8. **SWP I.B** pada Blok I.B.8. **SWP I.C** pada Blok I.C.4, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D	**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**													
II.2.D.1	**SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)**													

1 Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota ...../23

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota	**SWP I.A** pada Blok I.A.7; **SWP I.B** pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5; **SWP I.C** pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D.2	**PERWUJUDAN SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) pada perubahan fungsi kawasan hutan	**SWP I.A** pada Blok I.A.2 **SWP I.C** pada Blok I.C.4.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D.3	**SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**													
1	Pengembangan/pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.6; **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; **SWP I.C** pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

1 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan ...../24

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.D.4	**PERWUJUDAN SUB-ZONA SPU KECAMATAN (SPU-2) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D.5	**SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**													
1	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	**SWP I.B** pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; **SWP I.C** pada Blok I.C.2.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.E	**ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU**													
1	Pembangunan/pengembangan plaza (anjungan)	SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.F	**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA**													
II.2.F.1	**SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**													

1 Pemeliharaan/pengembangan Pasar Umum (Induk) ...../25

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan/pengembangan Pasar Umum (Induk)	SWP I.B pada Blok I.B.1											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.F.2	**SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**													
1	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/jasa skala WP	**SWP I.A** pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7 **SWP I.B** pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8 **SWP I.C** pada Blok I.C.1.											APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.F.3	**PERWUJUDAN SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Perwujudan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.F.4	**SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**													
1	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/jasa skala SWP	**SWP I.A** pada Blok I.A.1 **SWP I.B** pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7 SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.											APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.G	**ZONA PERKANTORAN**													
1	Pemeliharaan/pengembangan kantor Distrik dan Balai/Kantor Kampung dan kantor pemerintah lainnya.	**SWP I.A** pada Blok I.A.2 **SWP I.B** pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta

2 Pengembangan perkantoran non pemerintah ...../27

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pengembangan perkantoran non pemerintah	**SWP I.A** pada Blok I.A.2 **SWP I.B** pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 **SWP I.C** pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5.											APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta
II.2.G.1	**PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan zona perkantoran pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.H	**ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**													
1	Pengembangan sarana dan prasarana TPS3R	SWP I.B pada Blok I.B.8											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, dan/atau Swasta
II.2.I	**ZONA TRANSPORTASI**													
II.2.I.1	**TERMINAL PENUMPANG**													

1 Pembangunan terminal penumpang type C ...../28

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan terminal penumpang type C	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.I.2	**PELABUHAN PENYEBERANGAN**													
1	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I	SWP I.B pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
II.2.I.3	**PELABUHAN PENGUMPUL**													
1	Pengembangan/pemeliharaan Pelabuhan pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.

II.2.I.4 PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN ...../29

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.I.4	**PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan zona transportasi pada perubahan fungsi kawasan hutan	**SWP I.A** pada Blok I.A.3 **SWP I.B** pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.J	**ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANANAN**													
1	Pemeliharaan/pengembangan kawasan militer	**SWP I.A** pada Blok I.A.2; **SWP I.B** pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; **SWP I.C** pada Blok I.C.3, Blok I.C.4											APBN, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan, TNI.
II.2.K	**ZONA PERUNTUKAN LAINNYA**													
II.2.K.1	**SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)**													
1	Pemeliharaan/pengembangan IPAM	SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

II.2.K.2 PERWUJUDAN SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN ...../30

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.K.2	**PERWUJUDAN SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.K.3	**PERWUJUDAN SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan sub sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.K.4	**SUB-ZONA PERGUDANGAN**													

1 Pengembangan sarana dan prasarana pergudangan ...../31

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pengembangan sarana dan prasarana pergudangan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.K.5	**PERWUJUDAN SUB-ZONA PERGUDANGAN PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**													
1	Perwujudan sub-zona pergudangan pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

PLT. BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Plt. Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN VI : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																	
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
001	Rumah Tunggal	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
002	Rumah Kopel	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
003	Rumah Deret	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
004	Asrama	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	X	X	X	X	B1, T3
005	Rumah Kost	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T4	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	X	X	X	X	B1, T3
006	Panti Jompo	8790	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X
007	Panti Asuhan	8790	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X
008	Rumah Dinas	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
009	Rumah Sederhana	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
010	Rumah Menengah	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
011	Rumah Mewah	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
012	Rumah Adat	68111	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	T3	T3	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	I
013	Ruko	4711	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
014	Warung	5610	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
015	Toko	4711	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
016	Pasar Tradisional	4782	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
017	Pusat Perbelanjaan	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
018	Mini/Supermarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
019	Bahan Bangunan & Perkakas	4779	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
020	Peralatan Rumah Tangga	4759	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
021	Hewan Peliharaan	7500	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
022	Alat & Bahan Farmasi	4772	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
023	Pakaian dan Aksesoris	4719	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3

024 Peralatan & Pasokan Pertanian ...../2

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																		
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perantukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
024	Peralatan & Pasokan Pertanian	4779	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
025	Tanaman	4776	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I
026	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3
027	Jasa Bangunan	9522	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I
028	Jasa Lembaga Keuangan	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	I
029	Jasa Komunikasi	47414	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	I	I
030	Jasa Pemakaman	96910	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
031	Pelayanan Penunjang Kesehatan / Laboratorium Medis	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	B3	B3	B3	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I
032	Jasa Renovasi Barang	9524	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I
033	Jasa Bengkel	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3
034	Depo Bahan Bakar Minyak	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3
035	Agen penyalur Bahan Bakar Minyak	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3
036	SPBU	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B3	T1, T2, T3, B2, B3
037	Jasa Penyediaan Makanan & Minuman	5610	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
038	Jasa Travel & Pengiriman Barang	7911	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
039	Jasa Pemasaran Properti	6820	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
040	Jasa Perkantoran/ Bisnis Lainnya	6811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3

041 Taman Hiburan ...../3

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																		
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
041	Taman Hiburan	93211	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B1, B2, B3
042	Bisnis Lapangan / Gedung Olahraga	93114	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3
043	Studio Keterampilan	5920	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	B1, B3
044	Panji Pijat	9612	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
045	Restoran	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
046	Jasa Penginapan/Hotel	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3
047	Salon	9611	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
048	Laundry	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T3, B2
049	Kantor Camat / Distrik	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
050	Kantor Lurah / kampung	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
051	Kantor Polisi / TNI	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
052	Kantor PDAM	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
053	Kantor PLN	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
054	Kantor Urusan Agama	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
055	Kantor UPTD Pend.	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
056	Kantor Pemadam Kebakaran	84234	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	I	I	X	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	T1, T2, T3, B2	I	X	X	X	X	I	I
057	Kantor Swasta	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B3	T1, T2, T3, B3	I	I	I	X	T1, T2, T3, B3	T1, T2, T3, B3	T1, T2, T3, B3	I	X	X	X	X	I	I
058	Makanan/Minuman	1075	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B3
059	Tekstil	1392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Pakaian Jadi	14111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Pengemasan Barang	82920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B3

062 Kayu ...../4

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																	
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
062	Kayu	1610	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3
063	Kertas	1701	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3
064	Publikasi dan Percetakan	18120	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
065	Mesin dan Peralatan	28113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Alat-Alat Kendaraan Bermotor	3091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Daur Ulang	3811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	T1, T2, T3, T4, B2, B3	X	I	X	X	X	I	I
068	Industri Berat	3312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	TK	8511	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
070	SD	8511	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
071	SMP	8511	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
072	SMA/SMK	8511	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
073	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	85311	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
074	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	85331	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
075	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	I	I	I	X	X	B1, B3	B1, B3	I	X	X	X	X	X	X
076	Rumah Sakit	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3
077	Rumah Sakit Bersalin	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3
078	Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3
079	Posyandu	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3
080	Balai Pengobatan	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	X	X	B1, B3

081 Pos Kesehatan ...../5

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																	
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
081	Pos Kesehatan	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3
082	Praktek Dokter	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	X	X	B1, B3
083	Bidan	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	X	X	B1, B3
084	Poliklinik	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	B1, B3	X	X	B1, B3
085	Sport Center.	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3
086	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3
087	Fasilitas Stadion	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3
088	Mesjid / Gereja / Tempat Ibadah	9491	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I
089	Langgar/ Musholla	9491	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I
090	Jasa Penyedian Gedung Serba Guna / Ruang Pertemuan	6811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3
091	Lembaga Sosial	8899	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3
092	Terminal	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	X	X	T2, B2, B3	X	X	X	I
093	Lapangan Parkir / Gedung Parkir	52215	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B2, B3	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	I	X	I	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3
094	Pemanfaatan Hutan Tanaman / Rimba Kota	0211	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
095	Penanaman, Perawatan dan Pemeliharaan Taman Kota	8130	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
096	Penanaman, Perawatan dan Pemeliharaan Jalur Hijau	8130	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
097	TPU/Penyediaan Pemakaman	8130	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
098	Tempat atau Taman Bermain dan Taman Rekreasi Lainnya	81300	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	I
099	Trotoar/pedestrian	4210	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I

100 Plasa ...../6

NO. KEGIATAN	KEGIATAN	KBLI	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																		
			Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
					Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			perumahan kepadatan sedang	perumahan kepadatan rendah	SPU skala kota	SPU skala Kecamatan/Distrik	SPU skala Kelurahan/Kampung		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
100	Plasa	4210	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I
101	Pertanian Lahan Basah	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Pertanian Lahan Kering	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Hortikultura	113	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X	T3, B3	X	X	I
104	Wisata Alam	9322	X	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Wisata Budaya	9102	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Wisata Buatan	9323	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2, B3
107	Perikanan	03221	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3
108	Peternakan	4632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	TPS / wadah komunal	3821	X	X	B2, B3	B2, B3	X	X	I	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	B2, B3	B2, B3	B2, B5	B2, B6	B2, B3
110	BTS/ Tower	42215	X	X	T3, B3	T3, B3	X	X	I	X	T3, B3	T3, B3	B3	B3	B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3
111	Pembangkit Listrik	42213	X	X	T3, B3	T3, B3	X	X	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	B3	T2, B3	X	X	X	I	B3

Keterangan :

I : Kegiatan yang diizinkan
X : Kegiatan yang tidak diizinkan
T1 : Pembatasan operasional
T2 : Pembatasan intensitas ruang
T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan
T4 : Pembatasan luasan kaveling
B1 : Bersyarat wajib menyediakan parkir
B2 : Bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung
B3 : Bersyarat wajib mendapat persetujuan warga/instansi pemerintah

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Plt. Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN VII : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang			
				KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	Luas Kaveling minimum (m^2)
1.	HUTAN LINDUNG		HL	0	0	100	-
2.	PERLINDUNGAN SETEMPAT		PS	10	0,1	90	-
3.	RUANG TERBUKA HIJAU	a. Rimba kota	RTH-1	10	0,1	90	-
		b. Taman kota	RTH-2	10	0,1	90	-
		c. Pemakaman	RTH-7	10	0,1	90	-
		d. Jalur hijau	RTH-8	10	0,1	90	-
4.	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK		PTL	60	0,6	40	-
5.	PARIWISATA		W	50	1,0	50	-
6.	PERUMAHAN	a. Perumahan kepadatan sedang	R-3	70	1,4	30	72
		b. Perumahan kepadatan rendah	R-4	60	1,2	40	72
7.	SARANA PELAYANAN UMUM	a. Sarana pelayanan umum skala kota	SPU-1	60	1,2	40	-
		b. Sarana pelayanan umum skala kecamatan	SPU-2	60	1,2	40	-
		c. Sarana pelayanan umum skala kelurahan	SPU-3	70	1,4	30	-
8.	RUANG TERBUKA NON HIJAU		RTNH	70	0,7	30	-

9. PERDAGANGAN DAN JASA ...../2

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang			
				KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	Luas Kaveling minimum (m^2)
9.	PERDAGANGAN DAN JASA	a. Perdagangan dan jasa skala kota	K-1	70	1,4	30	-
		b. Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	70	1,4	30	-
		c. Perdagangan dan jasa skala SWP	K-3	80	1,6	20	-
10.	PERKANTORAN		KT	70	1,4	30	-
11.	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		PP	70	0,7	30	-
12.	TRANSPORTASI		TR	70	1,4	30	-
13.	PERTAHANAN DAN KEAMANANAN		HK	70	1,4	30	-
14.	PERUNTUKAN LAINNYA	a. Instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	60	1,2	40	-
		b. Pergudangan	PL-6	80	0,8	20	-

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN VIII : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan				
				TB Maks. (meter)	GSB Min. (dari AS jalan)	jarak bebas antar bangunan min.	Jarak Bebas Samping (JBS) min.	Jarak Bebas Belakang (JBB) min.
1.	HUTAN LINDUNG		HL	-		-	-	-
2.	PERLINDUNGAN SETEMPAT		PS	4	½ rumija + 1 (satu) meter	-	3 meter	3 meter
3.	RUANG TERBUKA HIJAU	a. Rimba kota	RTH-1	4	½ rumija + 1 (satu) meter	-	3 meter	3 meter
		b. Taman kota	RTH-2	4	½ rumija + 1 (satu) meter	-	3 meter	3 meter
		c. Pemakaman	RTH-7	4	½ rumija + 1 (satu) meter	-	3 meter	3 meter
		d. Jalur hijau	RTH-8	4	½ rumija + 1 (satu) meter	-	-	-
4.	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK		PTL	10	½ rumija + 1 (satu) meter	-	5 meter	5 meter
5.	PARIWISATA		W	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
6.	PERUMAHAN	a. Perumahan kepadatan sedang	R-3	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	1,5 meter	1,5 meter
		b. Perumahan kepadatan rendah	R-4	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	1,5 meter	1,5 meter

7. SARANA PELAYANAN UMUM ...../2

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan				
				TB Maks. (meter)	GSB Min. (dari AS jalan)	jarak bebas antar bangunan min.	Jarak Bebas Samping (JBS) min.	Jarak Bebas Belakang (JBB) min.
7.	SARANA PELAYANAN UMUM	a. Sarana pelayanan umum skala kota	SPU-1	10	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
		b. Sarana pelayanan umum skala kecamatan	SPU-2	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
		c. Sarana pelayanan umum skala kelurahan	SPU-3	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
8.	RUANG TERBUKA NON HIJAU		RTNH	4	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	5 meter	5 meter
9.	PERDAGANGAN DAN JASA	a. Perdagangan dan jasa skala kota	K-1	8	½ rumija + 1 (satu) meter	-	3 meter	3 meter
		b. Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
		c. Perdagangan dan jasa skala SWP	K-3	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
10.	PERKANTORAN		KT	8	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	2 meter	2 meter
11.	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		PP	8	½ rumija + 1 (satu) meter	-	5 meter	5 meter
12.	TRANSPORTASI		TR	8	½ rumija + 1 (satu) meter	-	2 meter	2 meter
13.	PERTAHANAN DAN KEAMANANAN		HK	8	½ rumija + 1 (satu) meter	-	2 meter	2 meter

14. PERUNTUKAN LAINNYA ...../3

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan				
				TB Maks. (meter)	GSB Min. (dari AS jalan)	jarak bebas antar bangunan min.	Jarak Bebas Samping (JBS) min.	Jarak Bebas Belakang (JBB) min.
14.	PERUNTUKAN LAINNYA	a. Instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	8	½ rumija + 1 (satu) meter	-	5 meter	5 meter
		b. Pergudangan	PL-6	10	½ rumija + 1 (satu) meter	3 meter	5 meter	5 meter

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN IX : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMUM

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
1.	Hutan lindung		HL	Ketentuan prasarana dan sarana minimal disesuaikan dengan upaya pelestarian kawasan hutan lindung
2.	Perlindungan setempat		PS	Ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
3.	Ruang terbuka hijau	a. Rimba kota	RTH-1	a. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastic atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan b. faslitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
		b. Taman kota	RTH-2	a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
		c. Pemakaman	RTH-7	a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Jalur hijau ...../2

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
		d. Jalur hijau	RTH-8	a. fasilitas lampu jalan; b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
4.	Pembangkitan tenaga listrik		PTL	a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.
5.	Pariwisata		W	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman lingkungan; c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

6. Perumahan ...../3

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
6.	Perumahan	a. Perumahan kepadatan sedang	R-3	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. c. RTH berupa taman kota/lingkungan/kampung; d. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan g. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.
		b. Perumahan kepadatan rendah	R-4	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* pada jalan lokal primer dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. c. RTH berupa taman kota/lingkungan/ kampung; d. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran lebar jalan minimal 3 (tiga) meter; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;

f. bangunan rumah ...../4

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
				f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah jika ada; dan g. pada setiap bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memerlukan air bersih harus memiliki bak penampungan atau tandon dengan minimum kapasitas 2000 liter per bangunan.
7.	Sarana pelayanan umum	a. Sarana pelayanan umum skala kota	SPU-1	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik; c. bangunan harus menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
		b. Sarana pelayanan umum skala kecamatan/distrik	SPU-2	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman lingkungan/kampung; c. bangunan menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;

e. tersedia jaringan ...../5

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
				e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
		c. Sarana pelayanan umum skala kelurahan/kampung	SPU-3	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman lingkungan/kampung; c. bangunan menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan i. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
8.	Ruang terbuka non hijau		RTNH	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;

c. tersedia jaringan ...../6

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
				c. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan; dan e. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
9.	Perdagangan dan jasa	a. Perdagangan dan jasa skala kota	K-1	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung; c. bangunan harus memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
		b. Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung; c. bangunan harus memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. penyediaan lahan ...../7

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
				f. penyediaan lahan parkir minimum 15 (lima belas) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
		c. Perdagangan dan jasa skala SWP	K-3	a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kampung; c. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; d. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. penyediaan lahan parkir minimum 15 (lima belas) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung; dan f. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
10.	Perkantoran		KT	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan/kawasan; c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.

11. Pengelolaan persampahan ...../8

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
11.	Pengelolaan persampahan		PP	a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan.
12.	Transportasi		TR	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan penampungan untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan h. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
13.	Pertahanan dan keamananan		HK	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman; c. bangunan harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif atau hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan penampungan air untuk menampung limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;

e. tersedia jaringan ...../9

No.	Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
				e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang disabilitas.
14.	Peruntukan lainnya	a. Instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.
		b. Pergudangan	PL-6	a. bangunan menyediakan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

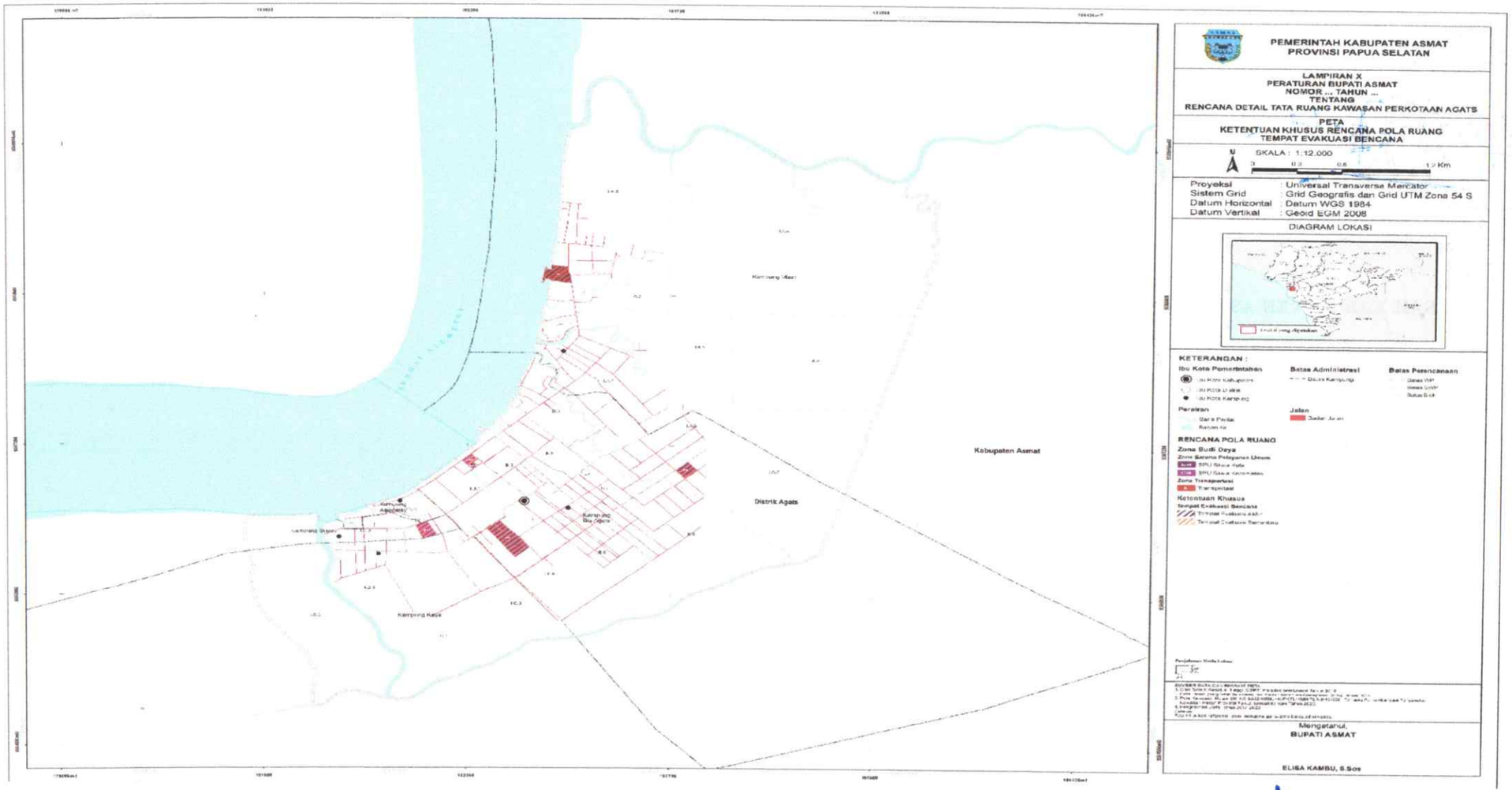
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN X : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

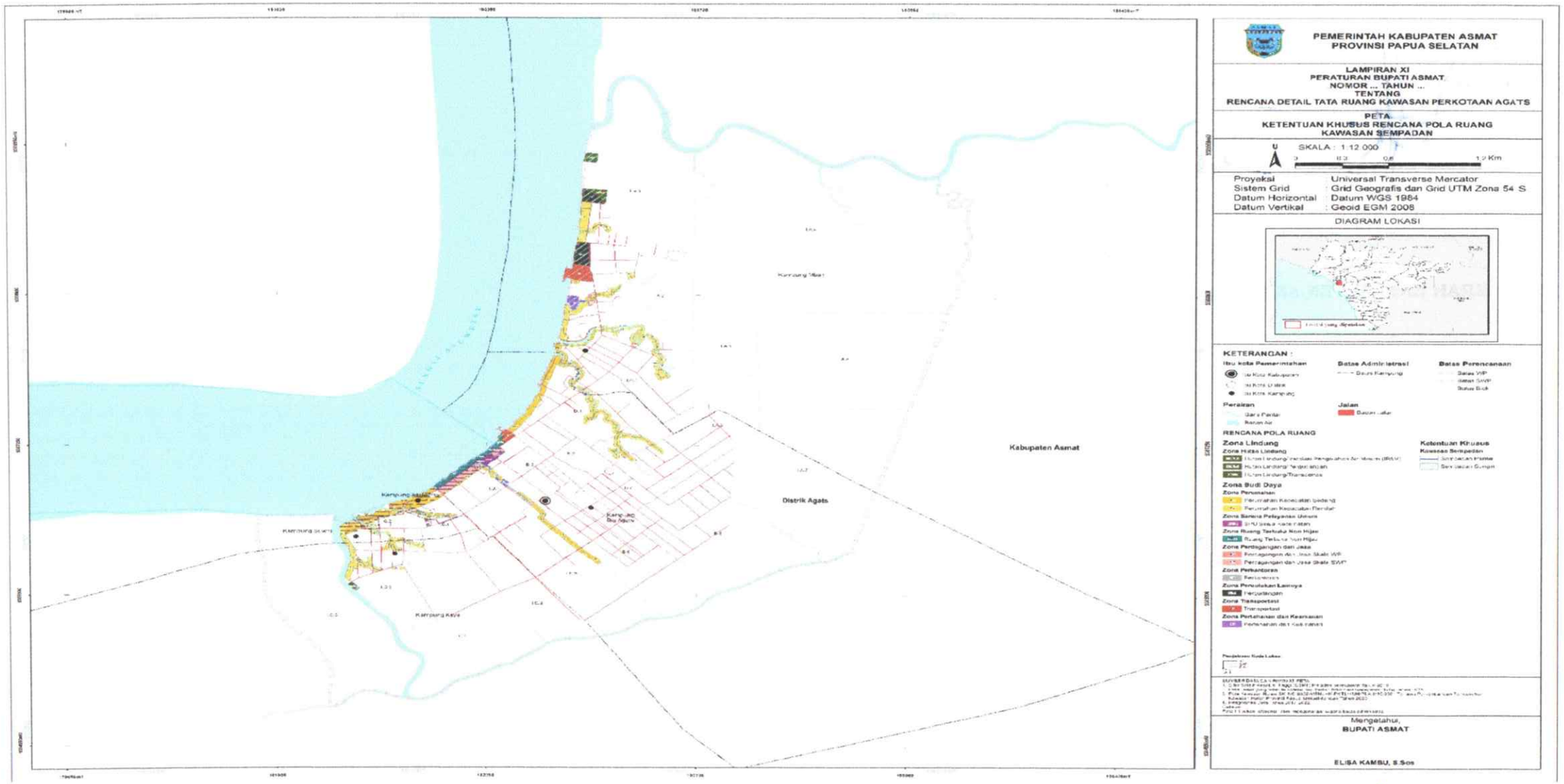
Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN XI : PERATURAN UPATI ASMAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI ASMAT,

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023 NOMOR 23